

ANALISIS PENGARUH KUALITAS SIMDA (SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEUANGAN DAERAH) TERHADAP KINERJA BENDAHARA PADA PEMERINTAH DAERAH KOTA TERNATE

Suharli Manoma

Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Maluku Utara

ABSTRACT

Local Government of Ternate City chose to use system issued by BPKP that is SIMDA. Ease in using SIMDA is to assist Local Government in implementing local financial management, data speed and accuracy. To know the influence of quality of SIMDA to Performance of Treasurer at Pemerintah of Ternate City. The location where the author's research is SKPD within the scope of Ternate city government. Respondents of this study amounted to 120 people. This research uses Simple Linear Regression data analysis.

The result of the analysis by using regression test obtained significant value of 0.003 or less than the value of probability (p-value) 0,05 ($0,003 < 0,05$) this means that independent variable that quality of SIMDA have significant influence simultaneously to the Treasurer's performance. Quality of Regional Financial Management Information System has a significant effect on the performance of treasurer work in Ternate Municipal Government.

Kata Kunci: Kualitas SIMDA, Kinerja Bendahara.

PENDAHULUAN

Sejak diberlakukannya otonomi daerah di Indonesia, pemerintah daerah merupakan organisasi sektor publik yang diberi kewenangan oleh pemerintah pusat untuk mengatur pemerintahannya sendiri. Kewenangan pemerintah daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah yang kemudian disempurnakan ke dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagai berikut: "Otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan"

Menurut Inpres Nomor 4 Tahun 2011, BPKP, dalam hal ini deputi pengawasan bidang penyelenggaraan keuangan daerah, memandang perlu untuk memfasilitasi Pemerintah Daerah dalam mempersiapkan aparatnya menghadapi perubahan, mendorong pelaksanaan tata kelola keuangan daerah

sesuai dengan peraturan yang berlaku, efisien, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel. Dengan demikian maka pemerintah daerah yang merupakan entitas pelaporan dapat menyajikan Laporan Keuangan secara wajar, transparan dan akuntabel. Aplikasi SIMDA merupakan program aplikasi yang digunakan untuk pengelolaan keuangan daerah secara terintegrasi yang nantinya akan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam berbagai hal di sektor pemerintahan. Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) digunakan sebagai alat untuk mengontrol berbagai aktifitas yang terjadi pada setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan sebagai bahan untuk membuat laporan keuangan.

Aplikasi SIMDA ini dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah yang memberikan kewajiban yang jelas dan tegas bagi setiap entitas pelaporan dalam hal ini adalah pemerintah daerah, untuk memberikan

pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah dalam suatu periode tertentu.

Sebelum Tahun 2013 kabupaten/kota masih menerapkan Sistem Informasi Keuangan Daerah. Setelah dievaluasi sistem ini mempunyai beberapa kelemahan yaitu relevansi informasi yang masih lemah, keakuratan data belum menjamin validitas data keuangan, dan masih terlambat proses informasi keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan daerah. Pada tahun 2013 diterapkan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) yang merupakan produk BPKP dalam memperbaiki sistem informasi manajemen pemerintah daerah. SIMDA diharapkan mampu untuk menghasilkan relevansi, keakuratan data dan ketepatan dalam menghasilkan laporan keuangan pemerintah daerah. Faktor yang mempengaruhi keterandalan pelaporan keuangan pemerintah adalah pengendalian intern. Berikut disajikan data kabupaten/kota yang sudah menerapkan SIMDA.

Tabel 1 Kabupaten/Kota yang Menerapkan SIMDA

Nama Pemerintah Daerah	Tahun Penerapan SIMDA
Kabupaten Halmahera Selatan	2008
Provinsi Maluku Utara	2011
Kabupaten Halmahera Barat	2012
Kabupaten Halmahera Timur	2013
Kabupaten Halmahera Tengah	2013
Kabupaten Halmahera Utara	2013
Kota Ternate	2013
Kabupaten Kepulauan Sula	2013
Kota Tidore Kepulauan	2013
Kabupaten Morotai	2014

Sumber: BPKP Perwakilan Maluku Utara (2016)

Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang andal (Sabeni, dan Lyna, 2007). Dengan kata lain pemerintah dituntut untuk bersikap transparan dan akuntabel terhadap laporan keuangan yang dihasilkan akan bernilai jika laporan keuangan tersebut disajikan secara akurat, dan tepat waktu.

Pemerintah Daerah Kota Ternate memilih untuk menggunakan sistem yang dikeluarkan

oleh BPKP yaitu SIMDA. Menurut BPKP (2006) kemudahan menggunakan SIMDA adalah membantu Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pengelolaan keuangan daerah, kecepatan dan akurasi data yang disajikan dalam laporan-laporan keuangan yang akan disajikan untuk para stakeholder, menyampaikan data keuangan untuk keperluan manajemen lainnya, menyajikan informasi yang akurat secara efektif dan efisien yang akan digunakan untuk para pengguna laporan, database yang telah tersimpan dalam SIMDA dapat diolah sesuai kebutuhan, dan lebih efektif dalam pelaksanaan penatausahaan dan akuntansi keuangan daerah.

Pemerintah daerah yang telah menerapkan SIMDA, laporan keuangan yang dihasilkan cukup baik dan mempengaruhi opini auditor atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Terkait dengan tugas untuk menegakkan akuntabilitas finansial, khususnya di daerah, pemerintah daerah bertanggung jawab untuk mempublikasikan laporan keuangan kepada pihak yang berkepentingan (*stakeholder*).

Informasi keuangan akan mempunyai manfaat jika disampaikan tepat waktu kepada pemakainya. Nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan penting bagi tingkat kemanfaatan laporan tersebut. Sebaliknya kegunaan laporan keuangan berkurang jika laporan tidak tersedia bagi pengguna dalam satu periode tertentu setelah tanggal pelaporan. Pelaporan keuangan pemerintah di Indonesia merupakan sesuatu hal yang menarik untuk dikaji lebih lanjut. Kenyataannya di dalam laporan keuangan pemerintah masih banyak disajikan data-data yang tidak sesuai. Selain itu juga masih banyak penyimpangan-penyimpangan yang berhasil ditemukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan dalam pelaksanaan audit laporan keuangan pemerintah.

Menurut Mardiasmo (2006), dalam Pasal 33 UU No 33/2004 disebutkan bahwa Menteri Keuangan berhak menunda penyaluran Dana Alokasi Umum (DAU) bila pemerintah daerah (pemda) belum menyerahkan laporan sistem keuangan daerah, termasuk APBD. Di tempat terpisah, Direktur Eksekutif Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Agung Pambudhi mendukung kebijakan Depkeu tersebut. Setidaknya terdapat tiga alasan yang

dapat dijadikan dasar sanksi tersebut: (1) UU No 32/2004 tentang Pemerintah Daerah (2) faktor koordinasi nasional, yaitu kondisi pelaporan perda APBD yang sering terlambat sehingga mengganggu perekonomian nasional (3) faktor kepentingan daerah.

TELAAH LITERATUR DAN HIPOTESIS

Penelitian ini menggunakan teori kegunaan informasi (*decision-usefulness theory*). Orang pertama yang menggunakan paradigma kegunaan keputusan (*decisionusefulness*) adalah Chambers. Ia mengatakan yaitu akibat yang wajar dari asumsi manajemen rasional adalah bahwa seharusnya ada sistem yang menyajikan suatu informasi; seperti sistem yang diperlukan baik untuk dasar pembuatan keputusan atau dasar untuk memperoleh kembali konsekuensi keputusan. Sistem yang menyajikan informasi secara formal akan menyesuaikan dengan dua dalil umum. Pertama adalah kondisi dari setiap wacana ilmiah, sistem seharusnya secara logika konsisten; tidak ada aturan atau proses yang dapat bertentangan dengan setiap aturan atau proses lainnya. Kedua muncul daripemakai laporan akuntansi sebagai dasar pembuatan keputusan dari konsekuensi praktik, informasi yang dihasilkan oleh setiap sistem seharusnya relevan dengan berbagai bentuk pembuatan keputusan yang diharapkan dapat digunakan (Bastian, 2006).

Nilai relevan diklasifikasikan sebagai kapasitas informasi untuk membuat suatu perbedaan dalam pengambilan keputusan oleh pemakai. Reliabilitas didefinisikan sebagai kualitas pemberian jaminan bahwa informasi itu secara rasional bebas dari kesalahan dan *bias*, dan mewakili apa yang akan digambarkan. Agar relevan, informasi harus bersifat logis jika dihubungkan dengan suatu keputusan (Bastian, 2006).

Kandungan kualitas primer kegunaan keputusan informasi akuntansi meliputi komponen-komponen kandungan dari nilai relevan, yaitu ketepatanwaktuan (*timeliness*), nilai umpan balik (*feed-back value*), dan nilai prediktif (*predictive-value*), dan komponen-komponen kandungan reliabilitas, yaitu penggambaran yang senyatanya (*representational faithfulness*), netralitas (*neutrality*), dan dapat diperiksa (*verifiability*). Selain itu juga terdapat kualitas sekunder, sebagai penghubung antara kualitas

primer, yaitu komparabilitas (*comparability*) dan taat asas (*consistency*) bastian (2006).

Menurut Jogiyanto (2000) informasi yang berkualitas dari suatu sistem tergantung pada tiga hal yaitu :

1. Akurat yang berarti informasi harus bebas dari kesalahan-kesalahan dan tidak bias atau menyesatkan. Akurat berarti informasi harus jelas mencerminkan maksudnya. Informasi harus akurat karena dari sumber informasi sampai ke penerima informasi kemungkinan banyak terjadi gangguan (*noise*) yang dapat merubah atau merusak informasi tersebut.
2. Tepat pada waktunya, berarti informasi yang datang pada penerima tidak boleh terlambat. Informasi yang sudah usang tidak akan mempunyai nilai lagi. Karena informasi merupakan landasan dalam pengambilan keputusan. Bila keputusan terlambat, maka dapat berakibat fatal untuk organisasi.
3. Relevan, berarti informasi tersebut mempunyai manfaat bagi pemakainya.

Kualitas sistem informasi merupakan salah satu tolok ukur keberhasilan sistem informasi. Kualitas Sistem Informasi merupakan penilaian menyangkut apakah kinerja suatu sistem informasi itu relatif bagus atau jelek, dan juga apakah sistem informasi yang disajikan cocok atau tidak cocok dengan tujuan pemakainya. Secara umum Kualitas Sistem adalah hasil yang dirasakan pengguna mengenai kinerja suatu sistem yang dioperasikan sesuai dengan harapan mereka. Pengguna merasa puas apabila harapan mereka terpenuhi. Pengguna yang puas cenderung tetap loyal lebih lama dan relatif lebih sering menggunakan sistem informasi.

Jogiyanto (2007) menjelaskan bahwa informasi merupakan hal yang sangat penting bagi manajemen di dalam pengambilan keputusan. Informasi berasal dari sistem informasi (*information systems*) atau dapat juga disebut dengan *processing systems* atau *information processing systems* atau *information generating systems*.

Fungsi sistem informasi dalam suatu organisasi adalah di antaranya sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan dan menyimpan data tentang aktivitas-aktivitas yang dilaksanakan oleh organisasi, sumber daya yang dipengaruhi oleh aktivitas-aktivitas tersebut, dan para pelaku yang terlibat dalam berbagai aktivitas

tersebut, agar pihak manajemen, para pegawai, dan pihak-pihak luar yang berkepentingan dapat meninjau ulang (*review*) hal-hal yang telah terjadi.

- b. Mengubah data menjadi informasi yang berguna bagi pihak manajemen untuk membuat keputusan dalam aktivitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.
- c. Menyediakan pengendalian yang memadai untuk menjaga aset-aset organisasi, termasuk data organisasi, untuk memastikan bahwa data tersebut tersedia saat dibutuhkan, akurat, dan handal.

Manajemen didefinisikan oleh Nugroho (2007) sebagai "suatu tim yang disusun dalam organisasi untuk mencapai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai oleh suatu organisasi". Menurut Mcleod (2010) "sistem informasi manajemen (SIM) merupakan sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama"

Menurut Kumorotomo (2004) "sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang diciptakan untuk melaksanakan pengolahan data yang akan dimanfaatkan oleh suatu organisasi". Menurut Kumorotomo (2004) menjelaskan bahwa "unsur-unsur yang mewakili suatu sistem informasi secara umum adalah masukan (input), pengolahan (processing), dan keluaran (output)". *Sistem Informasi* adalah sejumlah komponen (manusia, komputer, teknologi informasi, dan prosedur kerja), ada sesuatu diproses (data menjadi informasi), dan dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu. (Kadir, 2003) dalam Indriani dan Adryan (2009).

Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah merupakan sebuah sistem pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informasi yang dapat membantu pemerintah daerah dalam menghasilkan informasi keuangan yang relevan, cepat, akurat, lengkap dan dapat diuji kebenarannya. Aplikasi SIMDA juga dapat menghasilkan laporan keuangan dan informasi keuangannya lainnya secara lebih komprehensif yang meliputi informasi mengenai posisi keuangan daerah, kondisi kinerja keuangan dan akuntabilitas pemerintah daerah. Produk yang merupakan hasil pengembangan dari Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah

(SIMDA) adalah Program Aplikasi SIMDA Keuangan, Program Aplikasi SIMDA Barang Milik Daerah (BMD), Program Aplikasi SIMDA Gaji dan Program Aplikasi SIMDA Pendapatan (Dewi Andini, 2012). Tujuan pengembangan Program Aplikasi Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah adalah :

- a. Menyediakan database mengenai kondisi di daerah yang terpadu baik dari aspek keuangan, asset daerah, kepegawaian/aparatur daerah maupun pelayanan publik yang dapat digunakan untuk penilaian kinerja instansi pemerintah daerah.
- b. Menghasilkan informasi yang komprehensif, tepat dan akurat kepada manajemen pemerintah daerah. Informasi ini dapat digunakan sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
- c. Mempersiapkan aparat daerah untuk mencapai tingkat penguasaan dan pendayagunaan teknologi informasi yang lebih baik.
- d. Memperkuat basis pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah.

Berkaitan dengan uraian di atas, maka dapat di simpulkan bahwa Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) adalah merupakan suatu aplikasi Keuangan yang dapat menyelesaikan Laporan Keuangan yang lebih cepat dan tepat.

Dalam pemerintahan berdasarkan Undang-undang Reublik Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Bendahara adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah, menerima, menyimpan, dan membayar/menyerahkan uang atau surat berharga atau barang-barang negara/daerah. Dengan adanya otonomi daerah maka diperlukan adanya suatu pemisahan antara BUN dan BUD. Ketentuan yang diatur dalam undang-undang Perbendaharaan Negara dalam melaksanakan desentralisasi dan otonomi daerah khususnya yang terkait dengan pengelolaan uang. Keuangan daerah dibidang keuangan menuntut pemerintah daerah untuk mampu menggunakan dana yang dialokasikan pada daerah tersebut sesuai dengan sasaran pembangunan daerah tersebut sehingga mampu memacu pertumbuhan ekonomi daerah.

Perkembangan teknologi informasi komunikasi yang semakin pesat telah mempengaruhi sistem pengolahan data dan system informasi pada entitas yang melakukan pelaporan data keuangan. Untuk dapat melakukan pengolahan data keuangan secara efektif dan efisien maka dibutuhkan suatu sistem informasi terintegrasi yang dapat diandalkan, cepat dan akurat sehingga suatu sistem dapat diintegrasikan secara menyeluruh dan mampu memberikan informasi yang handal dan relevan.

Sistem informasi manajemen adalah suatu sistem yang bersifat menyeluruh, bertujuan untuk menyajikan informasi yang jauh lebih luas dari pada informasi akuntansi yang bersifat historis (Widjayanto, 2001). Sistem informasi manajemen yang selalu menggunakan teknologi pengolahan data elektronik, dengan menggunakan teknologi computer maka tingkat efisiensi pekerjaan akan semakin meningkat. Lebih jauh lagi sistem informasi manajemen dapat mengkomunikasikan seluruh *output* yang dihasilkan dari masing-masing sub sistem yang kemudian diintegrasikan menjadi sebuah informasi yang diperlukan bagi manajemen dalam pengambilan keputusan.

Organisasi sektor publik khususnya organisasi pemerintahan merupakan entitas yang memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan keuangannya kepada publik. Pemerintahan dalam sebuah organisasi sektor publik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat dan merupakan pendorong serta fasilitator dalam keberhasilan pembangunan disuatu daerah (Halim, 2007). Organisasi sektor publik yang berfungsi memberikan pelayanan kepada masyarakat juga harus dapat menyediakan sistem informasi yang bersifat interaktif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Guna mewujudkan praktik pengelolaan keuangan daerah yang cepat, tepat, dan akurat, Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) telah mengembangkan sistem aplikasi computer yang dapat mengolah data transaksi keuangan menjadi laporan keuangan yang dapat dimanfaatkan setiap saat, yakni Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) sebuah sistem berbasis aplikasi teknologi yang dikembangkan untuk mendukung tercapainya akuntabilitas bagi pemerintah daerah baik

ditingkat pelaporan (SKPKD) atau pun ditingkat akuntansi (SKPD). Aplikasi ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran, serta pelaksanaan dan penata- usahaan APBD dan pertanggungjawaban APBD. (www.bpkp.go.id)

Kualitas sebuah sistem informasi merupakan sebuah unsur yang sangat penting, karena jika sistem informasi yang dipakai baik dan berkualitas, maka bendahara sebagai salah satu pemakai sistem informasi tersebut tentunya akan merasa puas. Menurut Jawad & Reeves (1997) dalam Indriani & Adryan (2009) implementasi sistem kepuasan pengguna (*user satisfaction*) merupakan salah satu ukuran kesuksesan. Dalam hal ini, Kepuasan bendahara sebagai salah satu pengguna SIMDA yang akan menunjukkan sukses atau tidaknya Aplikasi SIMDA tersebut.

Pengukuran terhadap kualitas sistem informasi dan yang dihasilkan oleh sistem informasi dan dampak penggunaan sistem informasi terhadap kepuasan penggunanya perlu dilakukan untuk mengevaluasi dan memelihara keberhasilan penerapan sistem informasi akuntansi yang dapat meningkatkan kinerja penggunanya agar pelaporan pengelolaan keuangan daerah dapat dilakukan dengan baik (Kusuma 2012).

Berdasarkan argumentasi di atas, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut : Kualitas sistem manajemen keuangan daerah (SIMDA) berpengaruh terhadap kinerja bendahara pada pemerintah kota Ternate.

METODE PENELITIAN

Subyek Penelitian

Partisipan yang dilibatkan dalam eksperimen penelitian adalah Seluruh Bendahara pada SKPD di Kota Ternate. Sampel merupakan sebagian dari populasi. Sampel terdiri atas sejumlah anggota yang dipilih dari populasi (Sekaran, 2006). Jumlah responden dalam penelitian ini adalah semua bendahara, sehingga tiap SKPD ditetapkan secara *cluster sampling* sebanyak 4 orang yang menjadi responden yaitu Bendahara, Pembantu Bendahara, Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK), penentuan kriteria sampel didasarkan pada bagian penatausahaan

keuangan merupakan pihak-pihak yang sering berinteraksi menggunakan Aplikasi SIMDA dalam menyelesaikan tugas serta pekerjaan mereka sehari-harinya. Penentuan responden dengan jumlah 120 untuk 30 SKPD yang berkesempatan mengisi kuesioner penelitian dalam lingkup wilayah pemerintah kota Ternate

Uji Validitas

Pengujian ini dimaksudkan untuk dapat mempertanggungjawabkan ketelitian serta ketepatan kuesioner yang dibagikan kepada responden. Alat ukur yang valid berarti alat ukur tersebut dapat digunakan untuk mengukur apa yang hendak diukur. Uji validitas dilakukan dengan metode korelasi *product moment* dari *Pearson* dimana pengujian dilakukan dengan melihat angka koefisien korelasi (*rx_y*) yang menyatakan hubungan antara skor butir pertanyaan dengan skor total (*item-total correlation*). Butir dikatakan sah atau valid jika $r_{hitung} > r_{tabel}$ (Nugroho, 2011).

Uji Reliabilitas

Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui tingkat kepercayaan atau kesungguhan responden menjawab pertanyaan. Tujuan dari pengujian ini adalah seberapa besar suatu instrumen tersebut dapat dipercaya dan digunakan sebagai alat pengumpul data. Metode reliabilitas yang sering digunakan adalah metode *Cronbach's Alpha*. Koefisien *Cronbach's Alpha* menunjukkan sejauh mana kokonsistenan responden dalam menjawab instrumen yang dinilai. Semakin besar koefisien nilai alpha akan semakin reliabel data tersebut. Pengujian alpha akan dilakukan pada tiap bagian variabel independen dan variabel dependen (Nugroho, 2011).

Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran umum relevan dengan responden dengan menggunakan tabel distribusi yang merincikan mengenai kualitas sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) dan kinerja bendahara yang akan digunakan untuk menunjukkan tabel frekuensi distribusi absolut yang menunjukkan rata-rata, median, kisaran dan deviasi standar dimana diperoleh dari hasil jawaban responden yang diterima.

Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis ini dilakukan dengan uji analisis regresi linier sederhana untuk mengetahui pengaruh variabel bebas yaitu kualitas sistem informasi manajemen keuangan daerah (SIMDA) terhadap variabel terikat yaitu kinerja bendahara, baik uji determinasi (Uji R) yang kemudian dilanjutkan dengan pengujian parsial (Uji t) untuk mengetahui tingkat ketepatan perkiraan dalam analisis regresi. Pada pengujian ini dihitung besarnya koefisien determinasi (R) yang merupakan koefisien yang menunjukkan besarnya presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Tingkat signifikansi yang digunakan dalam penelitian ini adalah 5% (Ghozali, 2013).

Uji Statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variabel dependen (Ghozali, 2013). Pengujian dilakukan dengan menggunakan signifikan level 0,05 ($\alpha=5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria:

1. Jika nilai signifikan > 0,05 maka hipotesis ditolak (koefisiensi regresi tidak signifikan).
2. Jika nilai signifikan < 0,05 maka hipotesis diterima (koefisiensi regresi signifikan).

Persamaan statistik yang digunakan adalah:

$$K_{in} = \alpha + \beta_1 SIMDA + e \dots\dots\dots(1)$$

Dimana:

- KIN = Kinerja Bendahara
- α = Konstanta
- β_1 = Koefisien Regresi
- SIMDA = Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA

ANALISIS HASIL

Analisis Data

Analisis data dilakukan dengan cara yakni uji kualitas data, analisis model regresi linear sederhana dan uji hipotesis, data yang tersedia bagi variabel dependen yaitu kinerja bendahara dan variabel independen adalah kualitas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah. Analisis dilakukan dengan menguji pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen yaitu kinerja bendahara secara parsial melalui uji t dan untuk mengetahui besarnya presentase pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen melalui uji r.

Hasil Uji Validitas Data

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2005). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya.

Tabel 2 Uji Validitas Instrumen Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (X)

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
X.1	.724**	.000	Valid
X.2	.679**	.000	Valid
X.3	.435*	.016	Valid
X.4	.536**	.002	Valid
X.5	.601**	.000	Valid
X.6	.448*	.013	Valid
X.7	.372*	.043	Valid
X.8	.395*	.031	Valid
X.9	.736**	.000	Valid
X.10	.415*	.023	Valid
X.11	.375*	.041	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Tabel 2 di atas menunjukkan bahwa semua butir pernyataan untuk variabel Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (X) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkap akan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Tabel 3 Uji Validitas Instrumen Kinerja Bendahara (Y)

Pernyataan	Pearson Correlation	Sig.	Keterangan
Y1	.570**	.001	Valid
Y2	.646*	.000	Valid
Y3	.554**	.001	Valid
Y4	.393*	.032	Valid
Y5	.457*	.011	Valid
Y6	.389*	.033	Valid
Y7	.561**	.001	Valid
Y8	.510**	.004	Valid

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 3 di atas terlihat bahwa semua butir pernyataan untuk variabel kinerja bendahara (Y) berada pada tingkat signifikansi yaitu dibawah 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa pernyataan dalam penelitian ini valid. Hal ini berarti bahwa semua item pernyataan yang digunakan dalam penelitian ini mampu mengungkapkan sesuatu yang diukur pada kuesioner tersebut.

Uji Reliabilitas Data

Suatu kuesioner dikatakan reliabel atau handal jika jawaban seseorang terhadap pertanyaan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Uji reliabilitas ini menghasilkan nilai *Cronbach Alpha*. Suatu variabel dikatakan reliabel jika memberikan nilai *Cronbach Alpha* lebih besar dari 0,70 (Nunnally, 1978 dan Nunnally and Bernstein, 1994 dalam Stanislaus S. Uyanto, 2009).

Tabel 4 Hasil Uji Reliabilitas

Cronbach's Alpha	Cronbach's Alpha Based on Standardized Items	N of Items
.850	.850	2

Sumber: Data primer yang diolah, 2016

Berdasarkan tabel 4 di atas nilai *alpha Cronbach* untuk keseluruhan skala pengukuran sebesar 0.850. nilai *alpha Cronbach* jelas berada di atas batas minimal 0,70 sehingga dapat disimpulkan bahwa skala pengukuran instrumen mempunyai reliabilitas yang baik.

Hasil uji statistik deskriptif

Statistik deskriptif merupakan statistik yang menggambarkan fenomena atau karakteristik dari data. Statistik deskriptif berkaitan dengan pengumpulan dan peringkat data, yang menggambarkan karakteristik sampel yang digunakan dalam penelitian Pengaruh Kualitas SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) Terhadap Kinerja Bendahara pada Pemerintah Daerah Kota Ternate. Analisis ini menjelaskan karakteristik target populasi terutama mencakup *mean*, dan standar deviasi.

Tabel 6 Mean dan Standar Deviasi

	Mean	Std. Deviation	N
Kinerja Bendahara	27.54	3.368	120
SIMDA	34.80	3.172	120

Sumber: Data primer yang diolah, 2016.

Pada tabel 6. menunjukkan bahwa pada variabel Y yaitu aspek kinerja bendahara dari 120 responden didapatkan nilai rata-rata (mean) sebesar 27,54 dengan standar deviasi yaitu 3,368. Pada variabel X yaitu variabel Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah didapat nilai rata-rata adalah 34,80 dengan standar deviasi sebesar 3,172.

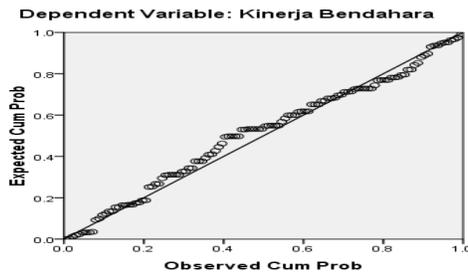
Hasil Uji Asumsi Klasik

a. Uji normalitas

Data-data bertipe skala pada umumnya mengikuti asumsi distribusi normal. Namun, tidak mustahil suatu data tidak mengikuti asumsi normalitas. Untuk mengetahui kepastian sebaran data yang diperoleh harus dilakukan uji normalitas terhadap data yang bersangkutan. Dengan demikian, analisis statistika yang pertama harus digunakan dalam rangka analisis data adalah analisis statistik berupa uji normalitas. Uji normalitas bertujuan untuk menguji variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut gambar grafik uji normalitas data pada grafik pp – plot.

Gambar 1

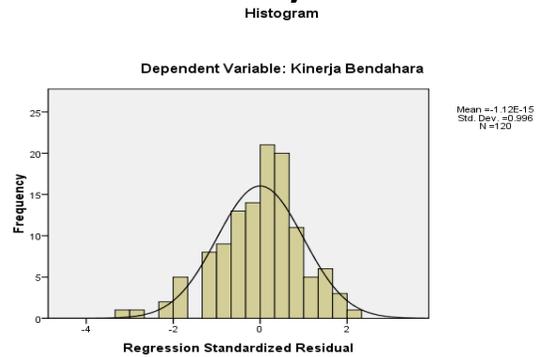
Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Sumber: Data primer yang diolah, 2016.

Berdasarkan grafik normal pp - plot pada gambar 1 menunjukkan bahwa model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena pada grafik normal plot terlihat titik-titik menyebar disekitar garis diagonal serta penyebarannya mengikuti arah garis diagonal sehingga memenuhi asumsi normalitas. Dapat juga kita lihat pada gambar 2 di atas menunjukkan bahwa data yang disajikan normal. Hal ini dilihat dari kurva pada grafik histogram yang seimbang atau tidak ada kemencengan baik menceng ke kiri maupun menceng kanan, sehingga memenuhi normalitas data.

Gambar 2 Hasil Uji Normalitas Data

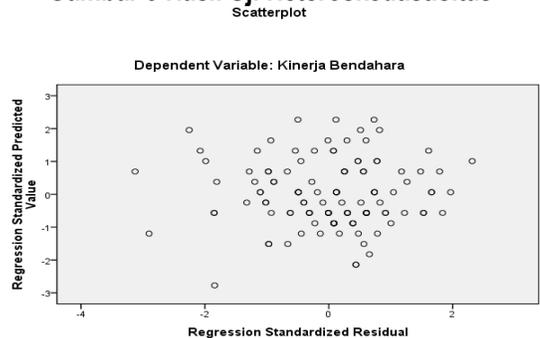


Sumber: Data primer yang diolah, 2016.

b. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka dapat disebut Homoskedastisitas dan jika berbeda disebut Heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang Homoskedastisitas atau tidak terjadi Heteroskedastisitas. Penelitian ini untuk melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel terikat (dependen) yaitu ZPRED dan residualnya SRESID. Deteksi ada atau tidaknya Heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada atau tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y diprediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*.

Gambar 3 Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber: Data primer yang diolah, 2016.

Dari grafik *scatterplots* pada gambar 3 terlihat bahwa titik-titik menyebar secara acak serta tersebar baik diatas maupun dibawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga layak dipakai untuk memprediksi kinerja bendahara berdasarkan masukan variabel independen Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah.

Hasil Uji hipotesis

Uji hipotesis dalam penelitian ini adalah uji statistik t. Uji statistik t berguna untuk menguji pengaruh dari variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen dapat dilihat pada tingkat signifikansi 0,05. Hasil uji statistik t dapat dilihat pada tabel 5, jika nilai *probability t* < 0,05, maka H_a diterima, sedangkan jika nilai *probability t* > 0,05 maka H_a ditolak.

Tabel 5 Rekapitulasi Hasil Analisis Regresi linier Sederhana

Model	Koef B	T	Sig.
1 (Constant)	17.484	5.320	.000
SIMDA	.289	3.073	.003
Multiple R	= .272 ^a		
R Square	= .074		
Adj. R Square	= .066		
F. hitung	= 9.441		
Sig F	= .003 ^a		

Sumber: Data primer yang diolah, 2016.

Tabel 5 di atas dapat diketahui tingkat signifikannya. Dalam model regresi didapatkan nilai signifikan $0.003 < 0,05$ sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak maka hipotesis yang didapatkan adalah terdapat pengaruh SIMDA terhadap kinerja kerja bendahara. Berdasarkan hasil perhitungan pada tabel 4.11 juga menunjukkan bahwa pada taraf nyata 5% ($=0,05$) dengan tingkat kepercayaan 95% diperoleh nilai Ttabel sebesar 1,980. Dengan pengujian statistik diperoleh nilai t hitung sebesar 3,073, karena nilai t hitung > t Tabel ($3,073 > 1,980$) maka disimpulkan bahwa variabel kualitas SIMDA (X) berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja bendahara.

Model Regresi Linier Sederhana

Tabel 5 di atas menampilkan nilai R yang merupakan simbol dari nilai koefisien korelasi sebesar 0,272. Nilai ini dapat diinterpretasikan bahwa hubungan kedua variabel penelitian ada

di kategori sedang. Melalui tabel ini juga diperoleh nilai R Square atau koefisien determinasi (KD) yang menunjukkan seberapa bagus model regresi yang dibentuk oleh interaksi variabel bebas dan variabel terikat. Nilai KD yang diperoleh adalah 7,4% yang dapat ditafsirkan bahwa variabel bebas X memiliki pengaruh kontribusi sebesar 7,4% terhadap variabel Y dan 92,6% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain diluar variabel X.

Pada tabel 5 di atas juga digunakan untuk menentukan taraf signifikansi atau linieritas dari regresi. Kriterianya dapat ditentukan berdasarkan uji F atau uji nilai Signifikansi (Sig.). Cara yang paling mudah dengan uji Sig., dengan ketentuan, jika Nilai Sig. < 0,05, maka model regresi adalah linier, dan berlaku sebaliknya. Berdasarkan tabel di atas, diperoleh nilai Sig. = 0,003 yang berarti < kriteria signifikan (0,05), dengan demikian model persamaan regresi berdasarkan data penelitian adalah signifikan artinya, model regresi linier memenuhi kriteria linieritas.

Berikut adalah persamaan dari regresi linier sederhana yaitu :

$$Y = 17.484 + 0.289 X$$

Interpretasi dari persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan berdasarkan hasil output SPSS berupa nilai B yang terdapat pada tabel 4.11 yaitu sebagai berikut :

- Konstanta (α) = 17.484 menunjukkan nilai konstan, dimana jika nilai variabel independen sama dengan nol, maka kinerja bendahara (Y) = 17.484.
- Koefisien regresi SIMDA sebesar 0.289 artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan SIMDA mengalami kenaikan 1%, maka kinerja bendahara mengalami kenaikan sebesar 0.289. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara SIMDA dengan Kinerja bendahara, semakin naik Kualitas SIMDA maka kinerja bendahara juga akan semakin naik.

Pembahasan

Pengaruh variabel kualitas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) terhadap kinerja kerja bendahara, dari hasil perhitungan didapatkan nilai signifikan lebih kecil dari pada nilai α sehingga dapat disimpulkan bahwa H_a diterima dan H_0 ditolak maka hipotesis yang didapatkan adalah terdapat

pengaruh SIMDA terhadap kinerja kerja bendahara. Selanjutnya berdasarkan hasil uji hipotesis menunjukkan bahwa nilai t_{hitung} lebih besar dari t_{tabel} sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel kualitas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja bendahara.

Hasil Koefisien regresi SIMDA menunjukkan bahwa apabila variabel independen lain nilainya tetap dan SIMDA mengalami kenaikan 1%, maka kinerja kerja bendahara akan mengalami kenaikan. Hasil koefisien regresi SIMDA yang didapat bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara SIMDA dengan Kinerja bendahara, sehingga dapat disimpulkan bahwa semakin meningkat Kualitas SIMDA maka kinerja bendahara juga akan semakin meningkat.

Hal ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Andini kusuma Dewi (2012) yang menunjukkan bahwa hasil uji koefisien determinasi bernilai positif, yang berarti bahwa variabel Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA mempunyai hubungan positif dengan variabel Kepuasan Pengguna Akhir Pada Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau. Hasil Uji F juga menunjukkan bahwa Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA berpengaruh signifikan terhadap Kepuasan Pengguna Akhir yang berarti bahwa variabel independen secara simultan berpengaruh terhadap variabel dependen.

Simpulan

REFERENSI

- Alamsyah, Andita Wasidipa. 2013. Pengaruh pemanfaatan teknologi informasi dan Kapasitas sumber daya manusia terhadap Ketepatan waktu pelaporan keuangan di pemerintah Daerah. Skripsi Tidak dipublikasikan. Universitas Jember. Jember
- Atikah dkk. 2012. Variabel Anteseden dan Konsekuensi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Studi Empiris pada SKPD Kota Mataram. Laporan Penelitian (Tidak Dipublikasikan)
- Belkaoui. 2000. *Teori Akuntansi*. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Bastian, Indra, 2006, Akuntansi Sektor Publik: Suatu Pengantar, Erlangga, Jakarta
- Dewi Andini Kusuma, 2012. Pengaruh Kualitas Sistem Informasi Aplikasi SIMDA (Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah) terhadap Kepuasan Pengguna Akhir (Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau).
- Ghozali, Imam. "Aplikasi Analisis Multivariat dengan program SPSS". Universitas Diponegoro Edisi IV, Jakarta, 2009.
- Halim, Abdul. 2007, Akuntansi Keuangan Daerah, Buku Edisi Ketiga. Bandung: Fokusmedia
- Istianingsih dan Setyo Hari Wijanto. 2008. Pengaruh Kualitas Sistem informasi Kualitas Informasi, dan Percived Usefulness Terhadap Kepuasan Pengguna Software

Berdasarkan hasil pengujian dan analisis data di atas, maka dapat diambil kesimpulan yaitu Kualitas Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA) berpengaruh signifikan terhadap kinerja kerja bendahara di pemerintah daerah kota Ternate.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, adapun saran yang akan diberikan yaitu :

- Penelitian ini dapat menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi Pemerintah kota Ternate sebagai dasar pengambilan keputusan dan diharapkan para responden dan instansi-instansi di Lingkungan Pemerintah kota Ternate dapat memelihara keberhasilan penerapan Aplikasi SIMDA ini. Dan diharapkan Pemerintah kota Ternate dapat memberikan pelatihan dan sosialisasi yang lebih rutin dan mendalam mengenai Aplikasi SIMDA kepada para pengguna dan semua instansi nya agar dapat meningkatkan kinerja para penggunanya.
- Peneliti selanjutnya diharapkan dapat menambah variabel independen lainnya guna mengetahui variabel-variabel lain yang dapat mempengaruhi dan memperkuat atau memperlemah variabel dependen.
- Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menambah jumlah sampel penelitian serta memperluas wilayah untuk sampel penelitian, sehingga dapat diperoleh hasil penelitian yang lebih baik lagi.

- Akuntansi. *Simposium Nasional Akuntansi IX*, Pontianak.
- Jogiyanto, HM . 2000. *Analisis dan Desain Sistem Informasi : Pendekatan terstruktur teori dan praktis aplikasi bisnis*. Andi.Yogyakarta.
- . 2007. *Analisis dan Desain Sistem Informasi*. Andi Yogyakarta. Yogyakarta.
- Kumrotomo. 2004. *Sistem Informasi Sektor publik*. BPFE UGM. Yogyakarta.
- Krismaji. 2005. *Sistem Informasi Akuntansi*. Yogyakarta: Akademi Manajemen Perusahaan YPKN.
- Mardiasmo. 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta:Andi.
- . 2006. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi Yogyakarta.
- M. Mitami Dian, 2013. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pangkep*. Universitas Hasanuddin Makassar
- Mcleod, Raymod. 2010. *Sistem Informasi Manajemen*. Salemba Empat. Jakarta.
- Nugraha, Harmadani AdiAstuti, Yuli Widi, 2013. *Analisis Penerapan Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA Keuangan) dalam Pengelolaan Data Keuangan pada Organisasi Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk)*. *Jurnal Akuntansi Aktual*. 2(1), 25-33. Universitas Negeri Malang
- Niftahusadah. 2010. *Persepsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terhadap pembuatan laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) sebelum dan sesudah pemanfaatan Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA)Keuangan pada* Pemerintah Kota Bandung. Skripsi tidak diterbitkan. Bandung: Fakultas Ekonomi Universitas Pendidikan Bandung.
- Ole Halens Ryanlie, 2013. *Analisis Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) terhadap Kualitas Laporan Keuangan SKPD (Studi Kasus pada Dinas PPKAD Kabupaten Minahasa Tenggara)*.
- PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- PP Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. 2005. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta.
- PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.2005. Ikatan Akuntansi Indonesia. Jakarta:
- PP Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah. 2009. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- PP Nomor 11 Tahun 2001 tentang Informasi Keuangan Daerah. 2009. Departemen Keuangan Republik Indonesia. Jakarta.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah,
- Peraturan Menteri dalam Negri Nomor 13 Tahun 2006.
- Sutanta. 2003. *System Informasi Manajemen*. Penerbit Graha Ilmu, Yogyakarta
- Utami, Wiwik dan Istianingsih. 2008. *Pengaruh Kepuasan Pengguna Sistem Informasi Terhadap Kinerja Individu (Studi Empiris pada Pengguna Paket Program Aplikasi Sistem Informasi Akuntansi di Indonesia)*. *Simposium Nasional Akuntansi Indonesia XII Palembang*.
- UUD Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.